**PROPORSIONALITAS DALAM PENJATUHAN PIDANA TERKAIT ADANYA
DISPARITAS PIDANA DALAM PERKARA NARKOTIKA**

Muhammad Naim

Hukum Universitas Airlangga
naimind@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Prinsip Proporsionalitas Dalam Hukum Penanganan Pidana Yang Berhubungan Dengan Diskusi Kasus Narkotika ditujukan pada perbedaan penalti pidana berkaitan dengan proporsionalitas penghukuman berdasarkan peraturan konstitusi yang berlaku. Penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, penyebab disparitas Hakim, internal dan eksternal Hakim, mekanisme pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim, dan kondisi yang didakwa. Faktor hukum pidana adalah cerminan prinsip proporsionalitas dalam pengambilan keputusan. Kedua, yang terpenting adalah pemahaman Hakim terhadap proporsionalitas. Dalam kasus ini, Hakim harus berperan dalam menentukan hal-hal yang berkaitan dengan hukum, bahkan jika peraturan konstitusi tidak mampu menyelesaikan.

Kata kunci: *Proporsionalitas, Disparitas Pidana, Hakim.*

ABSTRACT

The research entitled Principles Of Proportions In Cases Of Criminal Handling Connected With The Case Discussion Of Narcotics is aimed at different penalties relating to the proportionality of punishment under applicable constitutional rules. Judge, decision-making mechanism by the Panel of Judges, and indicted conditions. the criminal law factor is the principle of proportionality in decision making. Secondly, indicated in perpetrators of crime, crime victims. In this case, the Judge must play a role in determining matters relating law, even if the constitutional rule is unable to resolve.

Keywords: *Proportionality, Criminal Disparity, Judge.*

A. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia berpedoman teguh pada prinsip-prinsip Pancasila. Segala peraturan dibentuk dengan mempertimbangkan asas kepatutan hukum.¹ Hukum juga pedoman hidup yang memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan ketentraman berbangsa dan bernegara, terkait dengan *adagium ibi*

¹ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

societes ibi ius dalam ilmu hukum menimbulkan adanya hubungan individu dalam bermasyarakat dan hubungan antar masyarakat dengan hukum.²

Semua hubungan yang diatur oleh hukum menyangkut antar individu dan masyarakat serta hubungan masyarakat dengan hukum adalah *rechtsbetrekkingen*,³ hubungan-hubungan hukum pada masyarakat tersebut diperlukan suatu instrumen guna menciptakan suatu ketertiban dan ketentraman dalam hidup bermasyarakat dengan adanya jaminan dari peraturan hukum.⁴ Menegakkan Supremasi hukum dan menanggulangi segala sesuatu perilaku, perbuatan, dan tindakan yang menyimpang terkait suatu bentuk perbuatan yang melanggar norma hukum dan untuk menegakkan imparialitas hakim serta menjaga martabat dan keluhuran hakim, penyebutan seperti itu ada benarnya. Hal tersebut tidak berarti Hakim harus secara total menutup diri atau menjauhkan diri dari interaksi sosial. Hakim juga perlu melakukan komunikasi dan interaksi sosial dengan masyarakat. Dalam bentuk formal, media komunikasi dan interaksi sosial para Hakim dengan masyarakat dilakukan melalui putusan yang dijatuhkan oleh Hakim atas suatu perkara di persidangan.⁵

Hakim yang merupakan penentu nilai-nilai keadilan dan penegak hukum dalam negara yang berdasarkan Pancasila harus mengakui dan percaya adanya Tuhan yang Maha Esa selaras dengan prinsip sila pertama. Hakim harus jujur dan berintegritas dalam setiap perkara, bebas dari pengaruh siapapun. Hakim juga harus berkarakter, bijaksana, berilmu dan penuh pengabdian pada salah satu tugasnya yaitu mengadili. Mengadili menurut Hartono Hadisoeperto adalah:

Prosedur dalam memeriksa perkara pidana yang dilakukan hakim terhadap para principal berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak. Menurut KUHP pemeriksaan berdasarkan pada bukti-bukti yang cukup. Pada tahap ini tersangka dituntut oleh Jaksa penuntut umum dan diadili oleh Hakim dan selanjutnya disebut sebagai terdakwa.⁶

² Darji Darmodiharjo & Arif Shidarta, (1995), *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hal. 73.

³ L.J. van Apeldoorn, (2000), *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, Hal. 6

⁴ *Ibid*, h.7

⁵ Binsar Gultom, (2012), *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, hal.9.

⁶ Hadisoeperto Hartono, (2004), *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, hal. 127

Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempunyai pertimbangan sesuai dengan asas keadilan.⁷ Putusan Hakim terkadang mengundang suatu hal yang kontroversial. Pada kasus yang sama namun hakim menetapkan putusan pidana yang berbeda dimana dalam setiap putusan hakim berat atau ringannya suatu hukuman pidana yang dikenakan kepada terdakwa hakim memiliki kebebasan. Undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim antara hukum “minimum” atau “maksimum” tercantum dalam pasal-pasal pidana. Hakim menjatuhkan putusan pembedaan harus didasarkan pada surat dakwaan.⁸

Pengertian tentang “kebebasan hakim” diatur pada Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 4 ayat (3) jo Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam memutus suatu perkara terkadang terdapat perbedaan pendapat pada majelis hakim yang disebut disparitas Putusan Hakim. Disparitas putusan pada penyelenggaraan peradilan khususnya di Pengadilan Negeri Surabaya, pernah terjadi pada kasus narkoba. Dua kasus yang serupa namun putusannya berbeda yaitu Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1931/Pid.B/2014/PN.Sby dan Nomor: 2397/Pid.B/2013/PN.Sby. dalam kompetensi absolut di atas memiliki karakteristik yang hampir sama yaitu melanggar ketentuan Pasal 114 dan Pasal 132, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dari latar belakang tersebut Penulis memilih isu hukum sebagai berikut :

1. Apa faktor-faktor terjadinya disparitas putusan Hakim ?
2. Apa saja prinsip yang menjadi dasar penjatuhan pidana terkait asas proporsionalitas pembedaan ?

B. METODE / GAGASAN

Pembahasan dalam penelitian hukum ini menggunakan gagasan/metode yuridis normatif dengan melakukan pendekatan terhadap hukum positif yang berlaku (*statue approach*),⁹ Serta metode penelitian perbandingan dalam penerapan hukum terhadap

⁷ Basuki Ahmad, (2013), *Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Jurnal Perspektif Vol.XVIII Tahun 2013 Edisi Januari, Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Surabaya.

⁸ Gultom Binsar, (2012), *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, hal.14.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, (2010), *Penelitian Hukum*, Kencana Pranada Media, Jakarta, hal.96

kasus yang serupa namun putusan pidananya berbeda. Membandingkan putusan perkara pidana No: 1931/Pid.B/2014/PN.Sby dengan putusan No: 2397/Pid.B/2013/PN.Sby. Bahan hukum primer diantaranya UUD 1945; KUHP; KUHAP; UU No.48 Th 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; UU No.35 Th 2009 tentang Narkotika; Putusan No: 1931/Pid.B/2014/PN.Sby dan Putusan No: 2397/Pid.B/2013/PN.Sby. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur, Artikel ilmiah hukum Pidana dan Kehakiman, jurnal dan makalah-makalah.¹⁰ Metode analisa yang digunakan adalah metode deskriptif analisis artinya bahan hukum dianalisis untuk ditarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum yang ada.¹¹

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor yang menjadi problematika Disparitas Pidana

1.1 Problematika Disparitas

Disparitas pidana yang kerap terjadi di lingkungan peradilan merupakan bentuk dari diskresi Hakim dalam memutus suatu perkara dan menjatuhkan putusan, namun di sisi lain putusan pidana yang berbeda membawa kekecewaan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya,¹² akibatnya kekecewaan tersebut berimplikasi pada penilaian yang sangat tidak baik pada institusi peradilan.¹³ Fenomena tersebut merupakan sisi lain dari sistem peradilan yang tidak sama terhadap sesama pelaku kejahatan sejenis yang kemudian dikenakan hukuman yang berbeda. Contohnya terhadap perkara perkosaan yang sifat dan bentuk-bentuknya sama, tetapi hakim memberikan perbedaan yang mencolok terhadap putusan pembedaan.

Muladi berpendapat bahwa saat terpidana mengetahui putusan pidana atas kasusnya lalu memperbandingkannya akan merasakan kekecewaan mendalam karena telah jadi korban terhadap judicial caprice dan menjadi terpidana yang membenci akan sistem hukum itu sendiri, padahal sikap menghargai dan patuh terhadap hukum merupakan tujuan dan intisari dari

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

proses pemidanaan.¹⁴ Harkrisnowo juga menambahkan tentang realita disparitas pidana yang cukup menimbulkan keresahan dan kekhawatiran apakah hakim sebagai decision maker telah sungguh-sungguh menjalankan kewenangannya dalam menggapai nilai-nilai keadilan pada saat melakukan proses penegakan hukum? Ditinjau dari sudut pandang sosiologis problematika disparitas pidana dinilai masyarakat umum sebagai bentuk ketidakadilan (societal justice). Namun jika dilihat dari sudut pandang yuridis formal, disparitas pidana bukan suatu hal yang dianggap melanggar hukum.¹⁵

Disparitas Pidana terjadi bukan hanya di Indonesia saja, namun beberapa Negara di belahan dunia menghadapi masalah permasalahan yang sama dalam proses penegakan hukum atau bahasa lain adalah *the disturbing disparity of sentencing* yang menjadi isu sensitif terhadap lembaga-lembaga peradilan.¹⁶

1.2 Kewenangan Hakim

Tugas dan kewajiban Hakim secara normatif diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yaitu dari Pasal 2, 4, 5, 8, 10, 11, 14, serta 22. Menurut Wildan Suyuti, hakim pun memiliki tanggung jawab secara spesifik terperinci dalam mengadili suatu perkara yaitu, mengonstatir (mengonstatasi), menetapkan atau merumuskan peristiwa kongkret dengan dibuktikan terlebih dahulu, Mengualifisir (mengualifikasi), Mengkonstituir (mengkonstitusi).¹⁷

1.3 Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Disparitas Pidana

Faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah perundang-undangan, intern dan ektern hakim, mekanisme pengambilan putusan, dan keadaan dalam diri terdakwa.

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, (2014), *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, Bandung, hal.54

¹⁵ Harkristuti Harkrsnowo, "Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia", dalam majalah KHN Newsletter, Edisi April (2003), (Jakarta:KHN,2003) hal.28

¹⁶ Muladi, 2014, "Dampak Disparitas Pidana dan Usaha mengatasinya", Bandung: Alumni, hal. 52.

¹⁷ Wildan Suyuthi Mustofa, 2013, *Kode Etik Hakim*, Prenadamedia Group, Jakarta, hal.107.

a. KUHP

Di dalam KUHP belum ada terperinci tentang pedoman pemidanaan¹⁸ Menyangkut “standardisasi” penjatuhan hukum terhadap terdakwa pun tergantung pada sang Hakim.¹⁹

b. Faktor-Faktor Pada Diri Hakim

Faktor ini sangat berkaitan erat dengan terjadinya disparitas pidana dan menjadi objek kajian terpenting yang perlu kita perhatikan. Sebagaimana menurut Soerjono Soekanto dalam teori Efektifitas Hukum menjelaskan secara terperinci faktor-faktor penyebab disparitas pidana oleh Hakim yaitu Faktor Internal Hakim seperti faktor sosial; faktor pendidikan; faktor perangai; faktor umur; faktor jenis kelamin. Faktor Eksternal Hakim yaitu faktor di luar keadaan kesehatan kejiwaan dan raga dari Hakim itu sendiri, contohnya latar belakang terdakwa dan apa yang menjadi alasan terdakwa sehingga melakukan tindak pidana.²⁰

c. Mekanisme Hakim Memutus Perkara

Pentingnya proses musyawarah yang dilakukan oleh majelis hakim saat memutus suatu perkara menjadi suatu wadah majelis hakim dalam berinteraksi untuk saling bertukar pikiran atas dasar surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa dan setiap hal yang terungkap dalam proses pemeriksaan saat sidang akan tetapi musyawarah terkadang selalu alot dan saling bersikeras memegang teguh akan argumentasi hukum yang dikemukakannya sehingga hakim sering berbeda pendapat atau *disenting opinion* atas perkara tersebut dan memiliki kesimpulan sendiri.²¹ Dalam hal musyawarah berlaku Pasal 182 ayat (6) sub a KUHP yaitu dengan *voting* suara.

d. Keadaan Dalam Diri Terdakwa

Beragam faktor dari berbagai sudut pandang hukum harus benar-benar dinilai Hakim terutama untuk menjamin objektivitas. Hakim sangat berwenang dalam menjaga tertibnya proses persidangan, diharuskan

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Wildan Suyuti Mustofa, *Op.cit.*, hal.168

²¹ Bambang Waluyo, 2014, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.86

menguasai hukum materiil dan hukum acara, serta memperhatikan apa yang menjadi hak terdakwa.²²

2. Prinsip Yang Menjadi Dasar Penjatuhan Pidana Terkait Asas Proporsionalitas Pemidanaan

2.1 Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim

Tujuan dari hukum dapat di klasifikasikan adanya 3 (tiga) aliran tujuan hukum yang selama ini berkembang, yaitu :²³

Aliran utilitis memasukkan nilai moral praktis yang ertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin warga masyarakat.²⁴ Aliran normatif/yuridis dogmatis yang sumber pola pikirnya pada positivistic memiliki tujuan bahwa adanya hukum dalam hal ini untuk sekadar menjamin terlaksananya amanat undang-undang dan adanya kepastian hukum.²⁵ Hakim dalam menyelesaikan pemeriksaan suatu perkara, secara kasuistis, selalu menjumpai dan tidak terlepas dari kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang perlu menetapkan ketiganya secara berimbang dan proporsional.²⁶

Menurut Suyuti, hakim dalam memeriksa perkara dan menentukan amar putusan yang idealnya harus memuat *idee des recht* yang meliputi tiga unsur yaitu keadilan (*Gerechtigheid*), kepastian hukum (*Rechtszekerheid*), dan kemanfaatan (*Zwechtmassigheid*). Ketiga asas tersebut harus benar-benar dipertimbangkan oleh Hakim dan diterapkannya secara berimbang dan proporsional, sehingga putusan yang dihasilkan dapat dan sesuai dengan harapan para pencari keadilan.²⁷ Ahmad Zaenal berpendapat bahwa Hakim harus lebih memprioritaskan asas keadilan sebagai nilai yang paling utama dalam amar putusan, keadilan ditempatkan paling diatas dan menjadi sebagai pisau analisis dalam setiap tahapan putusan, mulai dari tahap konstantir, tahap

²² *Ibid*, hal.94

²³ *Ibid*, hal.130.

²⁴ *Ibid*.

²⁵ *Ibid*.

²⁶ *Ibid*.

²⁷ Wildan Suyuti Mustofa, *Op.cit*, hal. 98.

kualifikasi dan tahap konstituir.²⁸ Majelis hakim pun harus melihat serta benar-benar mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat terdiri atas adat, kebiasaan dan segala hukum yang tidak tertulis namun dihormati oleh masyarakat tersebut. Hakim mempertimbangkan nilai keadilan secara detail dan menyeluruh serta membedakan perlakuan secara proporsional akan nilai keadilan menurut perorangan, kelompok kecil, serta kelompok besar atau masyarakat itu sendiri.²⁹

2.2 Asas Proporsionalitas Dalam Penjatuhan Putusan

Untuk memahami proporsionalitas diperlukan pendekatan mengenai keadilan. Menurut pandangan *Aristoteles*, bahwa keadilan harus dimengerti dalam pengertian kesamaan. *Aristoteles* berpendapat bahwa perbedaan penting antara kesamaan numerik yaitu mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Kesamaan proporsional yaitu memperlakukan setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya, kemampuannya, serta sesuai dengan apa yang seharusnya menjadi prestasi baginya.³⁰

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang menyebut kata proporsionalitas dengan istilah kesetaraan, berimbang dan tidak berat sebelah atau equitability dengan unsur justice dan fairness yang menghendaki jaminan keseimbangan dan kepastian menurut hukum.³¹

Penjatuhan hukuman sebagai nestapa yang secara proporsional adalah penjatuhan hukuman yang sesuai dengan tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan harus diperhatikan oleh majelis hakim. Prinsip proporsionalitas mensyaratkan adanya skala nilai untuk menimbang dan menilai berat ringannya pidana dikaitkan dengan tindak pidananya. Harkristuti menyatakan bahwa, Asas proporsionalitas telah lama dirumuskan dalam kitab-kitab hukum zaman Indonesia kuno sebagai parameter menjatuhkan hukuman.³²

²⁸ Ahmad Zaenal Fanani, *Berfilsafat dalam Putusan Hakim, Op.Cit*, hal.31.

²⁹ Ahmad Rifai, *Op Cit*, hal.134.

³⁰ Ahmad Zaenal Fanani, *Op.Cit*, hal.34.

³¹ *Ibid.*

³² MYS, *Disparitas Putusan dan Pemidanaan yang Tidak Proporsional*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt524a2ce258cb5/disparitas-putusan-dan-pemidanaan-yang-tidak-proporsional>. (diakses tanggal 20/05/2015)

2.3 Disparitas Putusan Terkait Penerapan Asas Proporsionalitas

Asas proporsionalitas menyebabkan adanya perbedaan antara satu putusan dengan putusan yang lain walaupun secara garis besar kasusnya adalah sama. Penyebab terjadi fenomena disparitas pemidanaan dalam lingkungan peradilan adalah sebagaimana dipaparkan oleh Sudarto bahwa, KUHP yang berlaku saat ini belum memuat pedoman pemidanaan yang tepat dan terperinci (*straftoemetingleiddraad*).³³ Pasal 10 (1) UU tentang Kekuasaan Kehakiman hanya mengamanatkan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan.³⁴

Putusan hakim akan sangat dihargai dan memuat nilai-nilai kewibawaan jika putusan tersebut dapat mencerminkan nilai keadilan hukum bagi masyarakat, dan juga menjadi sebuah produk hukum bagi masyarakat pencari keadilan. Sebelum majelis hakim memeriksa suatu perkara, maka ia akan bertanya kepada hati nuraninya sendiri, merenungkan hal tersebut apakah putusan ini akan adil dan bermanfaat (*kemaslahatan*) bagi manusia ataukah sebaliknya, akan lebih banyak membawa kepada kemudharatan, sehingga untuk itulah diharapkan seorang hakim mempunyai otak yang cerdas dan disertai dengan hati nurani yang bersih.³⁵

D. PENUTUP

1. Simpulan

- a. Terjadinya disparitas pada putusan hakim diantaranya perangkat peraturan perundang-undangan, faktor internal dan eksternal Hakim, proses pengambilan putusan dan kondisi terdakwa yang merupakan faktor yang cukup mempengaruhi terjadinya disparitas pidana dan cerminan dari asas proporsionalitas dalam pengambilan putusan.
- b. Diperlukan pemahaman terhadap asas proporsionalitas secara mendalam antara kepentingan terdakwa, Negara, dan korban.

³³ Muladi dan Barda Nawai A, *Op Cit*, hal.57.

³⁴ *Ibid*, hal.67.

³⁵ Wildan Suyuti Mustofa, *Kode Etik, Op.Cit*, hal.75

2. Saran

- a. Diperlukan penyempurnaan Undang-Undang terutama yang mengatur mengenai sanksi pidana sehingga mampu mencerminkan terpenuhinya citra keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Serta lebih memperhatikan dalam sisi pengembangan dan profesionalisme hakim untuk memutus suatu perkara.
- b. Hakim haruslah yang bervisi keadilan yang mampu melakukan pertimbangan dan penalaran secara benar.

E. DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar. 1997. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Rimdan. 2012. *Kekuasaan Kehakiman: Pasca-Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Bambang Waluyo. 2014. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Binsar Gultom. 2012. *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta.
- Binsar M.Gultom. 2013. *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Darji Darmodiharjo & Shidarta. 1995. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama.
- Gr. Van der Brught dan J.D.C Winkelman sebagaimana dikutip oleh Wil dan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Harkristuti Harkrsnowo. 2003. "Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia". dalam majalah KHN Newsletter. Edisi April. Jakarta: KHN.
- Hartono Hadisoeperto. 2004. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

L.J. van Apeldoorn. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, Muladi. *“Dampak Disparitas Pidana dan Usaha mengatasinya”*. Bandung: Alumni.

Muladi-Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-teori dan kebijakan Pidana*. Bandung.

Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media.

Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Artikel Jurnal

Ahmad Basuki. 2013. *Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Peradilan Pidana*. Jurnal Perspektif Vol.XVIII Tahun 2013 Edisi Januari. Fakultas Hukum. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Surabaya.

World Wide Web

Harkristuti Harkrisnowo, *“Rekonstruksi Konsep Pemidanaan di Indonesia”*, tersedia pada <https://devidarmawan.wordpress.com/2010/10/07/problematika-disparitas-pidana-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia/> diakses pada tanggal 15 Januari 2018 Pukul 17.27 WIB

MYS, *Disparitas Putusan dan Pemidanaan yang Tidak Proporsional*, tersedia pada <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt524a2ce258cb5/disparitas-putusan-dan-pemidanaan-yang-tidak-proporsional.html> diakses tanggal 15 Januari 2018 Pukul 17.27 WIB

Nining Ratnaningsih, *Perkembangan Asas-Asas Perjanjian* tersedia pada http://lembagabantuanhukumadani.blogspot.com/2013/09/perkembangan-asas-asas-perjanjian-dan_3599.html. diakses tanggal 15 Januari 2018 Pukul 17.27 WIB